

## BAB 1 : PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). Sedangkan AIDS adalah suatu penyakit yang ditandai dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Dengan melemahnya kekebalan ini, maka tubuh tak mampu lagi mempertahankan dirinya terhadap serangan penyakit. HIV/ AIDS merupakan masalah kesehatan global baik di negara maju maupun negara berkembang. Wilayah terburuk yang terinfeksi virus HIV adalah Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara.<sup>(1,2)</sup>

Indonesia merupakan negara yang tingkat penyebaran virus HIV/AIDSnya tercepat di Asia. Epidemik HIV/AIDS di Indonesia telah berlangsung lebih dari 20 tahun, dan sejak tahun 2000 fase epidemiknya sudah berubah dari tingkat *low* menjadi tahap *concentrated epidemic* (prevalensi lebih dari 5%) pada sub populasi beresiko tinggi yaitu pengguna NAPZA suntik (Penasun), wanita penjaja seks (WPS), pelanggan penjaja seks, lelaki seks dengan lelaki lain dan waria.<sup>(3)</sup>

Kasus HIV di Indonesia terus meningkat dari tahun 2011-2014 dengan perkembangan kasus pada tahun 2011 sebanyak 21.031 kasus, tahun 2012 sebanyak 21.511 kasus, tahun 2013 sebanyak 29.037 kasus, tahun 2014 sebanyak 32.711 kasus, dan tahun 2015 sampai pada bulan Maret adalah sebanyak 7.212 kasus. Sedangkan untuk kasus AIDS mengalami fluktuasi pada tahun 2011 sebanyak 8.015 kasus, tahun 2012 sebanyak 9.649 kasus, tahun 2013 sebanyak 10.163 kasus, tahun 2014 sebanyak 5.494 kasus, dan tahun 2015 sampai pada bulan Maret adalah 595 kasus.<sup>(4)</sup>

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menjadi wilayah penyebaran HIV/AIDS, sampai pada Bulan Maret tahun 2015 berada di urutan ke-sembilan dari sepuluh provinsi dengan *case rate* tertinggi. Dari tahun 2002-2014 tercatat kumulatif kasus AIDS di Sumatera Barat sebanyak 1192 orang dan kumulatif kasus HIV sebanyak 1179 orang.<sup>(4,5)</sup>

Kota Padang sebagai salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat, menjadi wilayah penyebaran HIV/AIDS. Distribusi jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS tersebar di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Distribusi jumlah kumulatif kasus HIV dan AIDS terbesar terdapat di Kota Padang diikuti oleh Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh. Data kasus HIV di Kota Padang tahun 2014 adalah 225 kasus, AIDS 95 kasus dan meninggal 11 kasus, dan HIV tahun 2015 adalah 227 kasus, AIDS 81 kasus dan meninggal 4 kasus.<sup>(3,6)</sup>

Meluasnya HIV/AIDS tidak hanya berpengaruh terhadap bidang kesehatan tetapi juga mempengaruhi bidang sosial ekonomi, hal ini jelas akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Untuk mengatasi HIV/AIDS, hingga saat ini belum ditemukan obat yang efektif, sehingga upaya pencegahan terhadap resiko penularan menjadi sangat penting. Salah satu strategi pencegahan dilakukan melalui kegiatan pendidikan kesehatan dan peningkatan pengetahuan yang benar mengenai patofisiologi HIV dan cara penularannya menjadi sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang terutama mengenai fakta penyebaran penyakit pada kelompok resiko rendah dan perilaku yang dapat membantu mencegah penyebaran HIV.<sup>(7)</sup>

Guna meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi, Presiden Republik Indonesia

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 mengamanatkan pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPAN, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) dan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota (KPAK/ K). KPAP diketuai oleh Gubernur, sedangkan KPAK/ K diketuai oleh Bupati/Walikota. Tugas dari KPAP dan KPAK/ K adalah merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanggulangan AIDS di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPAN.<sup>(8)</sup>

Kota Padang sejak tahun 2008 telah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS. Untuk tahun 2015-2017 susunan keanggotaan ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Nomor 37 Tahun 2015 yang tentunya memiliki tugas-tugas dalam rangka mencegah berkembangnya penyebaran HIV dan AIDS yang merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia, melakukan upaya-upaya penanggulangan secara terpadu, efektif, dan efisien. KPA Kota Padang diketuai oleh Walikota Padang, dan sebagai ketua pelaksana adalah Wakil Walikota Padang, total anggota di luar Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I dan II, serta Sekretaris I dan II adalah 15 orang yang merupakan pejabat struktural. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya KPA dibantu oleh sekretariat yang beranggotakan lima orang yang tercatat di Nasional dan sembilan orang yang tercatat di daerah.<sup>(9)</sup>

Tugas KPA Kota Padang berdasarkan Kepwako Nomor 37 Tahun 2015 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2007 adalah 1) Mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, 2)

Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten/Kota, 3) Menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten/Kota, 5) Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS, 6) Menyebarkan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat, 7) Memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas Camat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, 8) Mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS, 9) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.<sup>(9)</sup>

Hasil wawancara dengan Pengelola Program/Monev di Sekretariat KPA Kota Padang menunjukkan bahwa jumlah sumber daya manusia yang bekerja di Sekretariat untuk tahun 2015 adalah 11 orang. Sumber pendanaan untuk penanggulangan AIDS ini adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan *Global Fund*. Sarana dan prasarana sudah terdapat Kantor Sekretariat dan logistik seperti kondom dan media komunikasi, edukasi dan informasi, untuk metode terdapat pembagian tugas dari setiap bidang di sekretariat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam mengimplementasikan tugas antara lain keterbatasan dalam koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan anggota KPA, tidak adanya kekuatan KPA dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/ AIDS di Kota

Padang mengakibatkan banyak instansi yang tidak tahu dengan KPA, KPA dianggap sebagai LSM, kurang aktif dan kurang pedulinya instansi terkait serta menganggap permasalahan HIV/ AIDS hanya tugas Dinas Kesehatan dan Sekretariat KPA saja.

Kebijakan yang jelas dalam pertanggungjawaban program penanggulangan HIV/AIDS belum ada, keterbatasan anggaran mengakibatkan penyebarluasan informasi HIV/ AIDS menjadi terkendala, kurang efektifnya Camat dalam menggiatkan peran Warga Peduli AIDS (WPA) di wilayah kerjanya, tidak adanya anggaran dalam pembinaan LSM/ kelompok peduli AIDS yang telah dibentuk, kurangnya koordinasi anggota KPA Kota Padang dalam pelaporan kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS di wilayah kerjanya.

Penelitian yang dilakukan Rijadi Sadikin (2009) tentang Impelementasi Tugas-tugas Pokok Komisi Penanggulangan “*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*” (AIDS) Daerah (KPAD) dalam Penanggulangan HIV/ AIDS di Kabupaten Grobogan menyatakan bahwa KPAD dalam menjalankan tugas-tugas pokok belum memenuhi harapan KPA Pusat. Faktor penyebabnya adalah peran sekretariat yang belum optimal, belum adanya pemberdayaan setiap anggota, dan belum adanya uraian tugas setiap anggotanya. Direkomendasikan penguatan kelembagaan KPAD Kabupaten melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Kelompok Kerja (Pokja), deskripsi tugas, dan penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antara para *stakeholder* instansi terkait anggota KPAD guna membangun kesefahaman bahwa masalah HIV/AIDS merupakan tanggung jawab bersama.<sup>(27)</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Implementasi Tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam Menanggulangi HIV/AIDS Tahun 2016”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Impelementasi Tugas dari KPA Kota Padang dalam Menanggulangi HIV/AIDS 2016?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya informasi mengenai implementasi tugas dari KPA Kota Padang dalam menanggulangi HIV/AIDS Tahun 2016.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Diketahuinya informasi tentang *input* dalam implementasi tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang meliputi tenaga, dana, sarana prasarana, dan metode.
2. Diketahuinya informasi tentang *process* dalam implementasi tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang meliputi perencanaan (*plan*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*).
3. Diketahuinya informasi tentang *output* dari implementasi tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang yaitu terlaksananya tugas dari Komisi Penanggulangan AIDS di Kota Padang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang implementasi tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam menanggulangi

HIV/AIDS serta mengaplikasikan ilmu selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

## **2. Bagi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang**

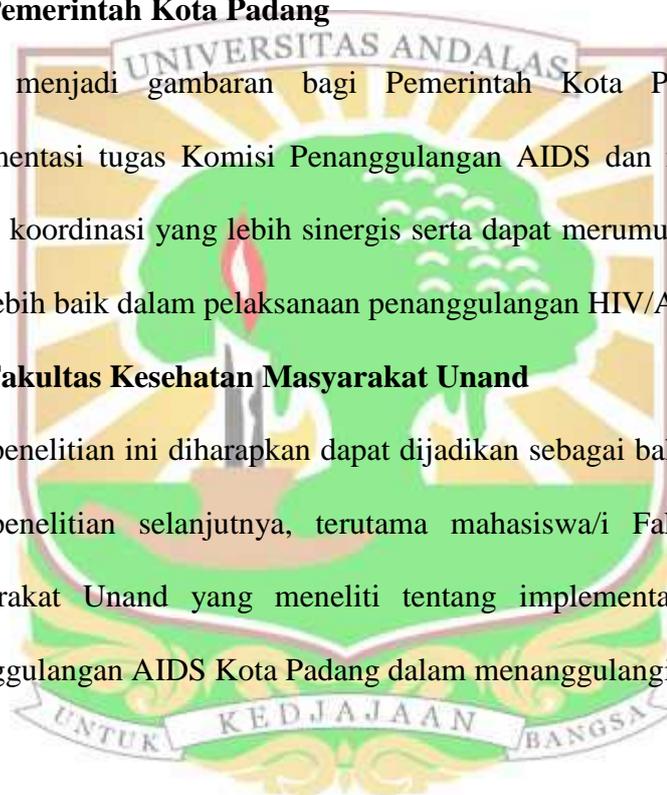
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam menyelenggarakan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Padang sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas implementasi tugas selanjutnya.

## **3. Bagi Pemerintah Kota Padang**

Dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kota Padang mengenai implementasi tugas Komisi Penanggulangan AIDS dan menjadi masukan dalam koordinasi yang lebih sinergis serta dapat merumuskan perencanaan yang lebih baik dalam pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS.

## **4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, terutama mahasiswa/i Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand yang meneliti tentang implementasi tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Padang dalam menanggulangi HIV/AIDS.



### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori sistem untuk menganalisis implementasi tugas yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS dalam menanggulangi HIV/AIDS di Kota Padang. Penelitian ini melihat tentang implementasi tugas melalui *input*, *process*, dan *output*.